

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia memiliki wilayah kepulauan Indonesia tergolong sangat luas, yaitu dengan luas daratan sebesar 1,92 juta km² dan luas perairan nusantara dan laut teritorial sebesar 3,1 juta km² serta luas perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sebesar 2,7 juta km², dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki sebanyak 19.508 pulau, dengan enam pulau utama yang berbasis pesisir di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, Pulau Bali – Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian Jaya (sekarang Papua) - Kepulauan Maluku (Adisasmita, 2008).

Perbedaan karakteristik wilayah merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi (Sirojuzilam, 2009). Dalam hal ini wajar apabila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam, dan melahirkan wilayah yang mampu tumbuh cepat sekaligus memunculkan pula wilayah yang relatif tertinggal atau tumbuh lebih lambat dari wilayah lainnya. Kondisi ini umumnya didorong perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dengan kecenderungan wilayah yang

memiliki sumberdaya yang memadai akan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi (Kuncoro, 2004).

Mencermati fenomena ketimpangan sama halnya dengan mengamati proses konvergensi yang terjadi pada wilayah-wilayah pulau utama di Indonesia, karena konvergensi diinterpretasikan sebagai kecenderungan semakin mengecilnya ketimpangan (disparitas) ekonomi antar negara wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu (Sala-i-Martin, 1996).

Menurut Shandika dan Hendarto (2012) perbandingan pendapatan dari tahun ke tahun dan perhitungannya didasarkan pada harga berlaku atau harga konstan merupakan cara untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut (Caska dan Riadi, 2008) kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Sadono Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Ini berarti bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan adalah PDRB, dari PDRB kita dapat melihat seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya, dengan kata lain pemerataan pendapatan. Berikut ini disajikan Tabel PDRB Pulau Jawa dan Bali :

Tabel 1.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PERKAPITA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT PROVINSI TAHUN 2006 - 2013 (MILYAR RUPIAH)

TAHUN	PROVINSI								
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali		
2006	312,827	257,499	150,683	17,536	271,798	71,058	23,084		
2007	332,971	274,180	159,110	18,292	288,404	75,350	24,450		
2008	353,723	291,206	168,034	19,212	305,539	79,701	25,910		
2009	371,469	303,405	176,673	20,064	320,861	83,454	27,291		
2010	395,622	322,224	186,993	21,044	342,281	88,552	28,882		
2011	422,242	343,194	198,270	22,132	366,983	94,198	30,758		
2012	449,805	364,752	210,848	23,309	393,663	99,992	32,804		
2013	477,285	386,839	223,100	24,567	419,428	105,856	34,788		

Sumber : BPS, PDRB Provinsi-Provinsi Di Indonesia. Tahun 2004 S.D 2014.

Tabel 1.1 menggambarkan PDRB selama delapan tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan tiap-tiap provinsi mengalami ketimpangan. Peringkat tertinggi dalam PDRB dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 yaitu provinsi DKI Jakarta. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat dari PDRB antara DKI Jakarta (PDRB tertinggi) dengan Provinsi Yogyakarta (PDRB per kapita terendah). Rentangan nilai perbedaannya sangat jauh antara kedua wilayah tersebut sehingga tercermin suatu disparitas pendapatan antara provinsi.

Beberapa faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya konvergensi PDRB per kapita, antara lain: Investasi dan Tenaga Kerja di Provinsi Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Dalam menghitung investasi dapat dilihat dari Pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. Berikut ini disajikan Tabel Investasi di Pulau Jawa dan Bali :

Tabel 1.2
REALISASI INVESTASI MENURUT PMTB DI PULAU JAWA DAN BALI 2006 – 2013 (JUTA RUPIAH)

TAHUN	PROVINSI								
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali		
2006	105,258,276	43,771,113	26,759,733	4,864,177	50,311,879	14,387,866	2,887,749		
2007	112,331,284	47,790,262	28,276,563	4,997,308	51,673,609	15,728,507	4,560,362		
2008	121,867,774	50,071,919	30,169,302	5,210,714	54,702,839	11,537,470	5,616,495		
2009	125,232,599	52,542,971	31,865,320	5,378,099	57,559,552	13,801,467	6,307,721		
2010	136,269,881	55,560,298	34,411,737	5,561,444	61,661,347	14,843,111	7,374,879		
2011	149,776,162	60,989,348	37,027,067	5,818,323	67,624,453	16,131,689	8,393,309		
2012	163,763,074	66,306,964	40,121,735	6,106,980	71,267,192	18,614,369	10,082,068		
2013	174,440,893	70,681,381	43,275,024	6,413,761	76,018,807	21,333,210	11,123,141		

Sumber : BPS, Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan Tahun 2006-2013.

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 yaitu sebesar 540,767,720. Sedangkan yang terkecil di Provinsi DI Yogyakarta pada Tahun 2007 yaitu sebesar 10,305. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia yakni 44,911 juta jiwa sebagai kunci investasi, yang masuk ke suatu negara dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut namun tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakatnya, sehingga terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan. Keuntungan investasi yang diperoleh didistribusikan keluar dari negara tersebut, sehingga investasi yang masuk hanya sebagai alat eksploitasi sumber daya di negara bersangkutan. Penyajian data investasi oleh BPS merupakan modal tetap domestik bruto sebagai gabungan investasi dari sektor swasta maupun sektor pemerintah.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Subri, 2003). Mengelompokkan tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Pada Tabel berikut menunjukkan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu tahun 2009-2013.

Menurut BPS penduduk berumur 10 keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa dan Bali yang tertinggi dari tahun 2006-2013 yaitu di Provinsi Jawa timur pada 2009 sebesar 20 338 568, sedangkan jumlah Tenaga Kerja terendah di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar 1,750,575. Hal ini menunjukkan masih kecilnya persentase terserapnya angkatan kerja yang bekerja yang ada di DI Yogyakarta. perbedaannya sangat jauh antara kedua wilayah tersebut sehingga tercermin suatu kesenjangan tenaga kerja antara provinsi tersebut. Hal ini disebabkan karena masalah keterbelakangan serta permasalahan sosial yang berakibat pada lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan di Jawa dan Bali.

Tabel 1.3
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KEGIATAN SELAMA SEMINGGU
YANG LALU TAHUN 2009-2013

Provinsi	Tahun									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
DKI Jakarta	3,812,590	3,842,944	4,191,966	4,687,727	5,272,604	5,143,826	5,368,572	5,180,014		
Jawa Barat	14,997,578	15,853,822	16,480,395	18,981,260	18,893,835	19,356,624	20,150,094	20,284,633		
Jawa Tengah	15,567,335	16,304,058	15,463,658	17,087,649	16,856,330	16,918,797	17,095,031	16,986,776		
DI Yogyakarta	1,750,575	1,774,245	1,892,205	2,016,694	1,882,296	1,872,912	1,944,858	1,910,959		
Jawa Timur	17,669,660	18,751,421	18,882,277	20,338,568	19,527,051	19,761,886	19,901,558	20,137,795		
Banten	3,235,808	3,383,661	3,668,895	4,357,240	5,309,462	5,210,224	5,125,057	5,146,305		
Bali	1,870,288	1,982,134	2,029,730	2,123,588	2,246,149	2,257,258	2,316,033	2,315,379		

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Di Indonesia Tahun 2006-2013. (Data diolah)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terjadi konvergensi pendapatan di pulau Jawa dan Bali (Konvergensi Sigma σ) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konvergensi pendapatan di Jawa dan Bali (Konvergensi Beta β) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, judul studi rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan studi sebagai berikut :

1. Menganalisis konvergensi pendapatan di pulau Jawa dan Bali (Konvergensi Sigma σ).
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konvergensi di Jawa dan Bali (Konvergensi Beta β).

1.4 Manfaat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan konvergensi pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Jawa dan Bali
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.
3. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pembanding studi serupa atau obyek yang berbeda dengan studi ini, serta dapat membantu

pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan konvergensi pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konvergensi.

Universitas Tanjungpura